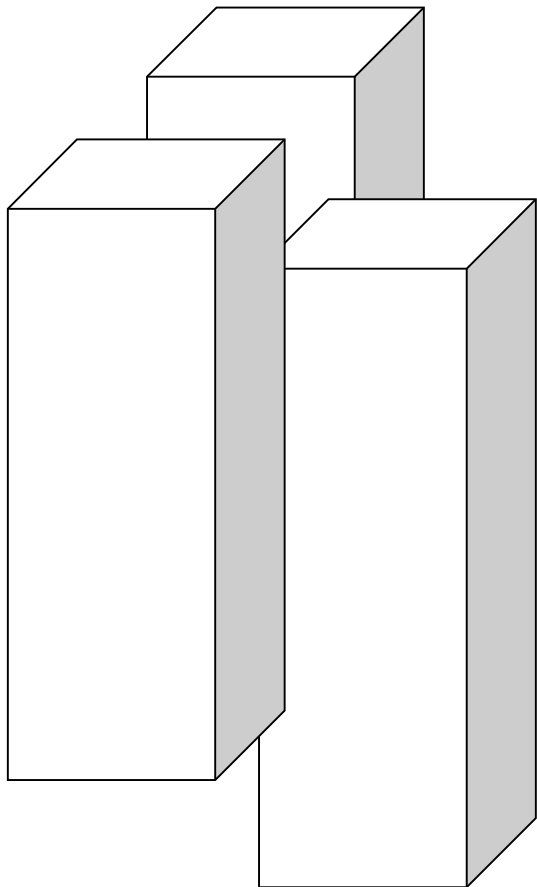


RENCANA KERJA TAHUN 2026



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 043);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
2. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

8. Perangkat....

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (3) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - d. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Lampiran I : Renja Dinas Pendidikan.
 - b. Lampiran II : Renja Dinas Kesehatan.
 - c. Lampiran III : Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Lampiran IV : Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - e. Lampiran V : Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Lampiran VI : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g. Lampiran VII : Renja Dinas Sosial.
 - h. Lampiran VIII : Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - i. Lampiran IX : Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

k. Lampiran XI....

- j. Lampiran X : Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- k. Lampiran XI : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- l. Lampiran XII : Renja Dinas Perhubungan.
- m. Lampiran XIII : Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- n. Lampiran XIV : Renja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- o. Lampiran XV : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- p. Lampiran XVI : Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- q. Lampiran XVII : Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- r. Lampiran XVIII : Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- s. Lampiran XIX : Renja Dinas Perikanan.
- t. Lampiran XX : Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- u. Lampiran XXI : Renja Dinas Peternakan.
- v. Lampiran XXII : Renja Sekretariat Daerah.
- w. Lampiran XXII.1 : Renja Bagian Umum.
- x. Lampiran XXII.2 : Renja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- y. Lampiran XXII.3 : Renja Bagian Hukum.
- z. Lampiran XXII.4 : Renja Bagian Organisasi.
- aa. Lampiran XXII.5 : Renja Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- bb. Lampiran XXII.6 : Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- cc. Lampiran XXIII : Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- dd. Lampiran XXIV : Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
- ee. Lampiran XXV : Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- ff. Lampiran XXVI : Renja Badan Pendapatan Daerah.
- gg. Lampiran XXVII : Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- hh. Lampiran XXVIII : Renja Inspektorat Daerah.
- ii. Lampiran XXIX : Renja Kecamatan Lobalain.
- jj. Lampiran XXX : Renja Kecamatan Rote Barat Laut.

kk. Lampiran XXXI....

- kk. Lampiran XXXI : Renja Kecamatan Rote Barat Daya.
- ll. Lampiran XXXII : Renja Kecamatan Rote Barat.
- mm. Lampiran XXXIII : Renja Kecamatan Rote Selatan.
- nn. Lampiran XXXIV : Renja Kecamatan Rote Tengah.
- oo. Lampiran XXXV : Renja Kecamatan Pantai Baru.
- pp. Lampiran XXXVI : Renja Kecamatan Rote Timur.
- qq. Lampiran XXXVII : Renja Kecamatan Ndao Nuse.
- rr. Lampiran XXXVIII : Renja Kecamatan Landu Leko.
- ss. Lampiran XXXIX : Renja Kecamatan Loaholu.
- tt. Lampiran XL : Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (5) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI ROTE NDAO,

PAULUS HENUK

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 044



LAMPIRAN XXII.6

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2026

Ita Esa

2002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia-Nya maka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2029 serta isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao. Rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Penyusunan rencana kerja ini dapat dilihat sejauh mana kegiatan yang diemban, tujuan, sasaran, meliputi kebijakan program dan kegiatan baik itu kegiatan utama maupun kegiatan penunjang yang dilaksanakan pada Tahun 2026 dalam berbagai aspek. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan, sehingga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi kemajuan perangkat daerah khususnya dan daerah pada umumnya.

Ba,a, 15 Agustus 2025

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kabupaten Rote Ndao



Joni A. Adu, ST

Pembina

NIP. 19840615 201001 1 023

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB V PENUTUP.....	32

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa S/D Tahun 2024.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 – 2027.....	15
Tabel 2.3	Review Rancangan Awal RKPD Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.....	18
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2026 serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024 dan substansi Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0005);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045;
17. (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Timur Nomor 005);
18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 043).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah:

1. Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida tahun 2026;
2. Pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;

Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN,

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; serta
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD;
4. Lampiran tabel rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung di tujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3. Tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya serta
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dan pencapaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun anggaran 2024, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp.809.329.000,- dengan realisasi sebesar Rp.771.080.445,- atau 95,27% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.39.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.360.000,- atau 100%, belanja barang dan jasa sebesar Rp.769.969.000,- dengan realisasi sebesar Rp.731.720.445,- atau 95,03%.

Rencana fisik secara kumulatif dari 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan sampai dengan kondisi triwulan IV Tahun 2024 mencapai Rp.771.080.445,- atau sebesar 95,27%. Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

B. Realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu:

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- II PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - 6 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu Administrasi Pendukung Realisasi Keuangan yang tidak terpenuhi.**
- D. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi-implikasi yang mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan profesional, diantaranya:**
 - a. Koordinasi lintas perangkat daerah, komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- E. Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Bagian Pengadaan Barang/Jasa S/D Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2025-2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)		REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	100	100			
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor		100 %						
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %					100 %	50	50,00
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %					100 %	22	22,22
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %					100 %	64	63,89
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %					100 %	100	100
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		0 Dok						
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %					100 %	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2025-2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)		REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok							
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan					12 Laporan	12	34,29
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	100	100			
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %							0
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD		27 bulan						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok		12 Dok	12	100	12 Dok	24	40,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	100 %	100	100			
		Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %					100 %	100	100
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah		2 Org/Bulan						
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	60 Dok		12 Dok	12	100	12 Dok	24	40,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2025-2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)		REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		Daerah SKPD								
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan								
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	24 Bulan							
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100	100			
		Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %					100 %	100	100
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	2	100	2 Paket	4	66,67
		Tersedianya Alat Tulis Kantor			24 Dok	12	100			
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		2 Paket	2	100	2 Paket	4	40,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi		55 Kali						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		20 Laporan	20	100	5 Laporan	25	83,33
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100	100			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2025-2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)		REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					100 %	100	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai		12 Bulan						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 laporan	12	100	12 laporan	24	200
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2 unit	2	100			
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	30 Unit					5 Unit	5	16,67
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional		2 Unit						
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			2 unit	2	100			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2 Unit				2 unit	4	40,00
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	19 Unit					3 Unit	3	15,79
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	80 %	44	55			
		Persentase paket pengadaan barang/jasa yang transparan dan tepat waktu			100 %	100	100	100 %	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2025-2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)		REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		Presentase tingkat kematangan unit kerja Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ)								
		Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	20,12 Skor					16,62 Skor	16,62	82,60
		Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	12,35 Skor					8,82 Skor	8,82	71,42
		Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	30,22 Skor					17,78 Skor	17,78	58,84
8	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui e-procurement		100 %	100 %	100	100			
		Persentase pengadaan barang/jasa melalui e- procurement	100,00 %					100 %	100	100
19	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksannya Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Bulan	12 Bulan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	24 dokumen		12 doku men	12	100	4 dokume n	16	66,67
20	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bulan	12 Bulan						
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	24 dokumen		12 Dok ume n	12	100	4 dokume n	16	66,67
21	Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 %						

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (2025-2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)		REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	73 orang		54 Org	54	100	44 orang	98	134,25
			100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100

Sumber Data: Bagian PBJ Setda Kab. Rote Ndao TA. 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan sangat bergantung dari proses perencanaan yang dilaksanakan, baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) dan dari tingkat atas (*top-down*) maupun dalam proses perencanaan yang teknokratik serta partisipatif, sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pembangunan yang lebih baik.

Dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa, maka ditetapkan beberapa rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

- 1. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa
- 2. Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan
- 3. Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)
- 4. Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Rote Ndao untuk tahun 2024 sampai dengan 2027 seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2024 - 2027

INDIKATOR	TARGET IKD	TARGET IKK	TARGET RENSTRA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN		PROYEKSI TAHUN		CATATAN ANALISIS
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	✓		36,66	43,21	54,46	63,77	36,66	43,21	54,46	63,77	
Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	✓		14,51	16,62	17,22	20,32	14,51	16,62	17,22	20,32	
Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	✓		8,82	8,82	10,59	12,35	8,82	8,82	10,59	12,35	
Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	✓		13,33	17,78	26,67	31,11	13,33	17,78	26,67	31,11	
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		✓	0	0	0	0	0	0	0	0	
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		✓	86,53	71,43	71,43	71,43	86,53	71,43	71,43	71,43	

INDIKATOR	TARGET IKD	TARGET IKK	TARGET RENSTRA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN		PROYEKSI TAHUN		CATATAN ANALISIS
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		✓	48,17	10,04	10,19	12,64	48,17	10,04	10,19	12,64	
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		✓	6,48	16,42	35,44	6,42	6,48	16,42	35,44	6,42	

Sumber: Data Olahan Bag. PBJ Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tingkat kinerja pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 telah mencapai target kinerja sebesar 95,05% dari target sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan telah berjalan sesuai rencana, baik dari sisi waktu, capaian output maupun pemanfaatan anggaran. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 merupakan upaya – upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam visi dan misi RPJMD tahun 2019 – 2024.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain:
1. Pemanfaatan sistem pengadaan yang belum efektif;

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola Pengadaan Barang dan Jasa belum optimal.
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao mempunyai peranan yang sangat penting dalam Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berbasis elektronik.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Di samping permasalahan seperti yang pada poin b, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Rote Ndao Amanah. Untuk itu Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas SDM Pengelola administrasi barang dan jasa;

2. Peningkatan efektivitas layanan pengadaan secara elektronik;
- e. Formulasi isu-isu penting/rekomendasi dan catatan yang strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan antara lain:

- 1) Rendahnya Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang meliputi indicator antara lain:
 - a) Rendahnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan;
 - b) Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa disebabkan proses perencanaan yang belum baik maupun pelaksanaan yang tidak tepat waktu;
 - c) Kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur pengadaan barang/jasa yang kompeten dikarenakan kurangnya pelatihan/bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa;
 - d) Tingkat kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) belum mencapai mencapai level 3 atau level proaktif yaitu dimana tidak hanya melaksanakan tugas pemilihan penyedia tetapi juga menjadi pusat data dan informasi serta pembina sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan barang/jasa;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatn produk dalam negeri pada OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan untuk membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Proses perbandingan dilakukan agar Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan dana, program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2026.
3. Dalam membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ada perbedaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja maupun kebutuhan dana di Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao.

Adapun tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Review Rancangan Awal RKPD Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERENCANAAN				902.964.750	PERENCANAAN				847.600.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100 %	175.352.550	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100 %	120.000.000
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		100 %			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100 %			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100 %			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100 %	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	19 Dokumen	6.572.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	19 Dokumen	3.600.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	3.286.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	2.500.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	7 Laporan	3.286.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	7 Laporan	1.100.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	43.380.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	21.400.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	43.380.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	21.400.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	4.200.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	3.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	4.200.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Dokumen	3.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	100 %	100.758.550	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	100 %	75.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	2 Paket	35.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	2 Paket	11.832.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	2 Paket	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	2 Paket	5.709.550	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kab. Rote Ndao, prop NTT, Luar prop NTT)	12 Laporan	33.217.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	12 Laporan	30.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	7 Unit	20.442.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	7 Unit	17.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	2 Unit	16.942.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	2 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	5 Unit	3.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	5 Unit	2.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase paket pengadaan barang/jasa yang transparan dan tepat waktu		100 %	727.612.200	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan		17,22 %	727.600.000
							Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)		10,59 %	
							Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)		26,67 %	
6	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	(Kab. Rote Ndao, prop NTT, Luar prop NTT)	100 %	727.612.200	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	(Kantor Bapelitbang Kab. Rote Ndao , Lobalainn)	100 %	727.600.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	(Kab. Rote Ndao, prop NTT, Luar prop NTT)	4 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	(Kab. Rote Ndao, prop NTT, Luar prop NTT)	4 Dokumen	500.000.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	(Kab. Rote Ndao, prop NTT, Luar prop NTT)	4 Dokumen	217.318.200	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	(Kab. Rote Ndao, prop NTT, Luar prop NTT)	4 Dokumen	217.306.000
	Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	2 Orang	10.294.000	Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	2 Orang	10.294.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak menjadi sumber usulan dari kelompok Masyarakat melalui kegiatan Musrenbang.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN: Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

Untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yaitu membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dukungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam pencapaian arah kebijakan

Nasional tahun 2026 adalah membuat rencana operasional di Bagian Pengadaan Barang/Jasa, menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, dan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dengan melaksanakan fungsi sbb:

- a. Perencanaan operasional Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional, dilaksanakan arah kebijakan berikut:

- a. Birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani:
 1. Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar.
 2. Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan melalui manajemen kinerja pembangunan.
 3. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah melalui revitalisasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka membangun pemerintah daerah yang adaptif, produktif serta memiliki kinerja yang unggul dan daya saing tinggi.
 4. Pemerintah digital melalui pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN.
 5. Pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif.
- b. Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba:

Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan penegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pembangunan Tahun 2024, prioritas pembangunan nasional dalam RKP Provinsi Tahun 2026 dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

Tema RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026: **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Ekonomi Inkusif Untuk Mewujudkan**

Pemerintahan Yang Bersih Dan Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan Melalui Penguatan Sektor Pariwisata, Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Dalam Bingkai Ita Esa.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 ditekankan pada program dan kegiatan yang benar-benar secara langsung berhubungan dengan kinerja pencapaian sasaran RPJMD, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta membiayai program/kegiatan yang bersifat mandatori dan mendesak. Prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, melalui:
 - a. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan perangkat desa berupa pelatihan dan beasiswa
 - b. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi
 - c. Penerapan sistem kearsipan digital dan tanda tangan elektronik
 - d. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
 - e. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
 - f. Peningkatan pelayanan publik dengan penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya, melalui:
 - a. Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin dan berprestasi
 - b. Pengembangan kegiatan ekstra kurikuler berbasis budaya bagi siswa dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta SD/SMP unggul
 - c. Peningkatan layanan kesehatan melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) bebas siklus hidup
 - d. Peningkatan sarana, prasarana dan mutu pendidikan
 - e. Pencegahan dan penanganan stunting
3. Peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal, melalui:
 - a. Fasilitasi UMKM berstandar BPOM dan perluasan pasar
 - b. Peningkatan pariwisata (festival dan promosi budaya, turnamen, *car free day*)
 - c. Pemberian modal usaha inklusif
 - d. Peningkatan pengawasan barang bersubsidi dan bahan pokok lainnya
 - e. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
 - f. Peningkatan jumlah kunjungan wisata
 - g. Peningkatan potensi pendapatan asli daerah
 - h. Peningkatan sarana prasarana perdagangan
4. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial), melalui:
 - a. Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kelompok rentan lainnya
 - b. Penguatan integrasi penanganan PMKS
 - c. Pemberian bantuan sosial, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan
 - d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penataan ruang, mitigasi bencana dan perubahan iklim serta lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui:
 - a. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan pada kawasan strategis dan daerah kantung kemiskinan
 - b. Peningkatan infrastruktur sanitasi dan air bersih
 - c. Penataan kota Ba'a berkelanjutan
 - d. Peningkatan layanan persampahan kota Ba'a
 - e. Peningkatan mitigasi bencana dan perubahan iklim

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku dengan Indikator tujuan/target yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa sebesar 54,46.

2. Sasaran

Terwujudnya administrasi layanan Pengadaan Barang / Jasa, dengan Indikator sasaran/target:

- a. Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan skor 17,22;
- b. Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dengan skor 10,59;
- c. Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) sebesar 26,67.

Uraian garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi:

- a. Tugas dan fungsi Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 untuk mencapai Tujuan dan Sasaran melaksanakan 2 program, 6 kegiatan, dan 12 sub kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebar di beberapa kawasan seperti di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan luar Kabupaten Rote Ndao.
- c. Total kebutuhan dana yang diperlukan Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao yang dirinci menurut sumber pendanaan Tahun 2026 sebesar Rp.847.600.000,-.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan logistic kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Perekonomian dan Pembangunan

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa.
 - Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pengelolaaan Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan berdasarkan urusan yang ditangani Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Bagian PBJ Setda Kabupaten Rote Ndao

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			847.600.000				847.800.000
4	01	01		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	120.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	120.200.000
						Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100 %	
						Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100 %	
						Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %				100 %	
4	01	01	2,01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	3.600.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19 Dokumen	3.800.000
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.500.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	2.600.000
4	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.100.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Laporan	1.200.000
4	01	01	2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	21.400.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 Org/Bln	21.400.000

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.400.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	21.400.000
4	01	01	2,03	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	3.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3.000.000
4	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	3.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	3.000.000
4	01	01	2,06	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	75.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	75.000.000
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	35.000.000
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	10.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT, KAB. ROTE NDAO)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Laporan	30.000.000
4	01	01	2,09	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 %	17.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	17.000.000
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	15.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	15.000.000
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	2.000.000

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
4	01	03		II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	17,22 %	727.600.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20,32 %	727.600.000
						Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	10,59 %				12,35 %	
						Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	26,67 %				31,11 %	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	100 %	727.600.000	Bagian PBJ Setda Kab.RN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	727.600.000
4	01	03	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	4 Dokumen	500.000.000	Bagian PBJ Setda Kab.RN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	500.000.000
4	01	03	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	4 Dokumen	217.306.000	Bagian PBJ Setda Kab.RN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	217.306.000
4	01	03	2.03	3	Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang	10.294.000	Bagian PBJ Setda Kab.RN	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 orang	10.294.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional dan sangat strategis karena menjembatani antara perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) implementasi pelaksanaan strategi jangka menengah (RPJMD) Daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, di tetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, sub-sub bagian dan seluruh staf pelaksana secara Bersama sama mempunyai tanggungjawab untuk:
 - 1) Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - 2) Menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan akan dilakukan pemantauan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran (PPAS) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.

Ba'a, 15 Agustus 2025

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kabupaten Rote Ndao,



Joni A. Adu, ST
Pembina
NIP. 19840615 201001 1 023